

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat rencana kerja Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta dalam memberikan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajian data dan narasi dalam dokumen ini.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran riil rencana pembangunan kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2023, serta menjadi masukan bagi semua pihak terkait agar dapat direalisasikan sesuai rencana. Akhir kata semoga dapat menjadi sumbangsih dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pontianak.

Waalaiikum salam. Wr.Wb

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

dr. Saptiko, M.Med.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199603 1 003

DAFTAR ISI

Hal

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN	
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1 Rencana Kerja	63
3.2 Pendanaan	139

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	13
2.2 Realisasi Capaian SPM Triwulan II Tahun 2023.....	24
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022	33
2.4 Formulasi Isu-isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023.....	37
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	41
2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	57
3.1 Tujuan, Sasaran beserta Indikator Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024	64
3.2 Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang berorientasi pada masa depan dengan melalui serangkaian pilihan-pilihan (Faludi, 1973). Menurut Peter Hall (1992), Perencanaan dimaknai sebagai penyusunan rangkaian tindakan secara berurutan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam konteks Perencanaan perangkat daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan diartikan sebagai proses perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode satu tahun, yang mencakup kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan dokumen resmi Dinas Kesehatan yang memuat program, dan kegiatan pada pelayanan Dinas Kesehatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Dokumen Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sampai pada sub kegiatan perangkat daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan terkait langsung dengan pelayanan publik pada masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dimulai dengan persiapan dan pengumpulan data, informasi, menganalisa data dan gambaran pelayanan pada Dinas Kesehatan untuk mengerucutkannya pada penentuan isu-isu penting bidang kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, hingga menghasilkan perumusan tujuan dan sasaran yang juga didasarkan pada review hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Strategis lima tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja juga merupakan rumusan yang didasarkan pada usulan kegiatan prioritas masyarakat yang diperoleh melalui proses musyawarah rencana pembangunan masyarakat (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Dokumen RKPD Tahun 2023
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
- c. Penyusunan Rencana Kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program / kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana tahun 2023.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki hubungan keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPB.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 166/D-Kes/Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 09/D-Kes/Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).
27. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen renja PD Tahun 2023 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI TAHUN LALU
BAB II.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB II.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan misi pertama Pemerintah Kota Pontianak adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Dengan tujuan Dinas Kesehatan adalah meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuannya adalah pada Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting.

Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”,

Berikut realisasi 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Dinas Kesehatan, yaitu :

“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”,

Berikut realisasi 10 Indikator Sasaran Dinas Kesehatan, yaitu :

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Pada Triwulan II Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu sebesar 47.50 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), adapun realisasi capaian Indikator Utama AKI Triwulan II tahun 2023 adalah 47.84 per 100.000 KH, masih lebih tinggi daripada target maksimal yang ditetapkan dalam menekan angka kematian ibu.

Adapun sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Sasaran Angka Kematian Ibu, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

2) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka Kematian Bayi Triwulan II Tahun 2023 adalah 1,53 per 1000 KH, angka realisasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target maksimal kematian bayi yang ditetapkan 2 per 1000 KH. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Capaian Indikator Utama penurunan Angka Kematian Bayi, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

3) Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Upaya peningkatan pelayanan pada orang terduga TBC sesuai standar pelayanan minimal ditetapkan sebesar 100%. Untuk capaian pelayanan untuk pasien terduga TBC Triwulan II Tahun 2023 yaitu 0 %.

Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung target capaian ini adalah:

- a. Sub kegiatan pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

4) Insiden Rate HIV

Upaya menurunkan angka kesakitan penderita HIV di Kota Pontianak telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun target indikator yang digunakan dalam upaya penurunan penderita HIV adalah Insiden Rate. Insiden rate adalah jumlah rata – rata kasus baru suatu penyakit. Target indikatornya di tahun 2023 dengan tahun yakni 0,0190%. Adapun capaian realisasi indikator Insiden Rate HIV Triwulan II Tahun 2023 adalah 0,014%.

Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Insiden rate HIV adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Sub Kegiatan tersebut, selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada bidang terkait juga dibantu oleh unit Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA);

b. Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

5) Insiden Rate DBD

Triwulan II Tahun 2023, Angka kesakitan rata-rata penderita DBD di Kota Pontianak sebesar 5,53 per 1000 Penduduk, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2,38 per 1000 penduduk. Adapun target maksimal kejadian Incidence Rate DBD adalah <49 per 100.000 penduduk, artinya angka kesakitan DBD 5,53% di tahun 2023 masih berada di bawah target ambang batas sasaran per 100.000 penduduk dimana jumlah sasaran DBD di Kota Pontianak adalah 668,935 penduduk, secara kumulatif diketahui jumlah penderita DBD di Tahun 2023 adalah 37 orang.

Adapun Sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Utama upaya penurunan Kesakitan Penderita DBD adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PSN).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

6) Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak

Upaya penanganan penderita Hipertensi di Kota Pontianak ditetapkan dengan target sebesar 25%. Adapun realisasi capaian upaya pencegahan prevalensi penderita Hipertensi Triwulan II Tahun 2023 adalah 0,06%, masih berada dibawah target maksimal yang ditetapkan. Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penurunan prevalensi penderita hipertensi adalah :

- a. Sub Kegiatan Pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- c. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan;
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

7) Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di Kota Pontianak

Upaya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam pengendalian Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus ditargetkan sebesar 2,40%. Untuk capaian kinerja kegiatan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 1,57% dengan jumlah penderita Diabetes yang berhasil di deteksi adalah sebanyak 7,898 orang. Data penderita Diabetes Mellitus diperoleh berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Pontianak sebanyak 7.898 orang dari jumlah sasaran penderita sebesar 504.444

penduduk. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan prevalensi Diabetes Mellitus adalah melalui sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- d. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan

8) Angka Wasting Balita

Angka Wasting Balita adalah perbandingan berat badan balita dengan tinggi badan (BB/TB). Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Angka Wasting Balita Triwulan II Tahun 2023 adalah 3,1% dari target yang ditetapkan 7%. Berikut Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan Angka Wasting Balita di Kota Pontianak adalah :

- a. Sub Kegiatan Upaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Ibu Hamil.

9) Angka Underweight Balita

Angka Underweight Balita adalah jumlah balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan hasil PSG di satu wilayah kerja dibagi jumlah seluruh sampel balita dalam survey PSG di satu wilayah kerja tersebut di kali 100%. Target Indikator Kinerja Angka Underweight Balita Triwulan II Tahun 2023 adalah 12,00%. Realisasi Kinerja dalam pencapaian Indikator Angka Underweight Balita di Kota Pontianak adalah 14,74%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya 9,61% maka terjadi peningkatan persentase jumlah Balita underweight, yang dapat di interpretasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja berupa meningkatnya temuan jumlah kasus balita underweight di Kota Pontianak berdasarkan hasil kegiatan survey PSG (Penilaian Status Gizi). Adapun Sub kegiatan untuk menunjang upaya penurunan Angka Underweight Balita adalah :

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

10) Angka Stunting Balita

Angka Stunting Balita adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak balita, yaitu tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya.

Realisasi Indikator kinerja utama Angka Stunting Balita Triwulan II Tahun 2023 sebesar 7,8%. Angka capaian kinerja Stunting Balita didapatkan berdasarkan Data dari Survey PSG (Penilaian Status Gizi), angka tersebut lebih rendah dari target maksimal yang ditetapkan di Kota Pontianak yaitu sebesar 14%. Artinya upaya penurunan kasus Balita Stunting di Kota Pontianak dikatakan telah Berhasil. Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Angka stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Balita adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat.
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- besar sub.kegiatannya adalah penyediaan media edukasi dan promosi.

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kota Pontianak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes) Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2023									
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
1	Urusan Pemerintahan Wajib																	
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap	80	%	80	%	80	%	100	%	125.00%	80.00	%	87	%	21.67

					elayanan Kesekretariatan														
1	02	01	201	Perencanaan, Pengganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Pengganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Dok ume n	10	Dok ume n	10	Doku men	10	Doku men	100.00%	40.00	Doku men	20	Doku men	5.00
1	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jangka Waktu Penyelenggara n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	Bula n	12	Bula n	12	Bulan	12	Bulan	100.00%	48.00	Bulan	24	Bulan	6.00
1	02	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	Bula n	9	Bula n	12	Bulan	12	Bulan	100.00%	48.00	Bulan	23	Lapor an	5.75
1	02	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggara n Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	Bula n	12		12	Kali	12		100.00%	48.00	Bulan	24	Bulan	6.00

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Unit	13		24	Unit	24		100.00%	24.00	Unit	20	Unit	5.08
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	Bulan	12		12	Bulan	12		100.00%	48.00	Bulan	24	Laporan	6.00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	192	Unit	100		48	Unit	48	Unit	100.00%	192.00	Unit	113	Unit	28.33
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	%	100	%	90	%	100	%	111.11%	100.00	%	100	%	25.00

					1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir	100	%	100	%	90	%	100	%	111.11%	100.00	%	100	%	25.00
					2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Balita	100	%	100	%	95	%	100	%	105.26%	100.00	%	100	%	25.00
					3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	100	%	100	%	95	%	100	%	105.26%	100.00	%	100	%	25.00
					4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	100	%	100	%	90	%	100	%	111.11%	100.00	%	100	%	25.00
					5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (yankes)	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	%	25.00
					6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	%	25.00

					elayanan reproduksi														
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar	100 %	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	1.00	%	67	%	16.75
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat, BMHP dan Alkes sesuai standar	100 %	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	1.00	%	67	Unit	16.75
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	%	-				-			100.00	%	33	%	8.33
					Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100	%	50	%	100	Utama/Pari purna =6 Pusk	-	Utama/Pari purna =6 Pusk	0.00%	100.00	%	50	%	12.50

					Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	%	94	%	100	%	97	%	96.77%	100.00	%	97	%	24.23
					Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	100	%	93	%	100	%	96	%	95.73%	100.00	%	96	%	24.06
					Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir	100	%	92	%	100	%	95	%	95.38%	100.00	%	96	%	23.95
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	83	%	100	%	84	%	84.02%	100.00	%	89	/1000 Penduduk	22.25
					Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	36	%	100	%	67	%	66.75%	100.00	%	68	%	16.90

					Persentase orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	30	%	100	%	72	%	71.61%	100.00	%	67	%	16.80
					Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	57	%	100	%	62	%	62.35%	100.00	%	73	%	18.28
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	21	%	100	%	33	%	33.34%	100.00	%	51	%	12.86
					Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	38	%	100	%	58	%	57.99%	100.00	%	65	Hari	16.33
					Persentase ODGJ Berat yang	100	%	58	%	100	%	66	%	66.31%	100.00	%	75	Oran g	18.69

					mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar														
					Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	62	%	100	%	87	%	87.31%	100.00	%	83	Oran g	20.78
					Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	99	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	Oran g	24.92
					Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	95	%	59	%	94.1	%	78	%	82.56%	95.00	%	77	Oran g	19.31
					Persentase Jamaah Calon Haji yang terdeteksi faktor risiko kesehatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	Oran g	25.00

					Persentase penanggulangan KLB yang direspon <24 Jam	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	Oran g	25.00
					Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	2	/1000 Pend uduk	3	/1000 Pend uduk	2	/1000 Pend uduk	3	/1000 Pend uduk	150.00%	2.00	/1000 Pend uduk	3	Oran g	0.67
					Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100	%	92	%	100	%	92	%	92.00%	100.00	%	95	Oran g	23.67
					Persentase Masyarakat Miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh Jaminan Kesehatan	100	%	75	%	100	%	141	%	141.00%	100.00	%	105	Oran g	26.33
					Persentase Pemeriksaan Crosscek Slide TBC	100	%	7	%	100	%	90	%	90.24%	100.00	%	66	Oran g	16.47
1	2	2	2.03	Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem	80%	%	114		80	%	100	%	125.00%	0.80	%	72		17.90

				secara Terintegrasi	Informasi Kesehatan														
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	%	100		100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100	%	25.00
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2.3	/1000 Penduduk	4.35	/1000 Penduduk	2,3/1000	penduduk	5	/1000 Penduduk		2.30	/1000 Penduduk	4	/1000 Penduduk	0.95
					Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	%	100	%	90	%	100	%	111.11%	90.00	%	97	%	24.17
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	-		100	%	64	%	64.00%	100.00	%	55		13.67

				Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota															
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	100		100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100		25.00
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90	%	100	%	90	%	90	%	100.00%	90.00	%	93		23.33
1	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	90	%	100		85	%	100	%	117.65%	90.00	%	97		24.17

				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional														
1	2	4	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100	%	100		100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100		25.00
1	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	%	100		100	%	100	%	100.00%	100.00	%	100		25.00

				Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	90%	%	100		85	%	59	%	69.41%	0.90	%	53		13.33
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100 %	%	100		100	%	100	%	100.00%	1.00	%	67		16.75

1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	%	100	%	90	%	100	%	111.11%	90.00	%	97		24.17
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaa n, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	49	%	100	%	100	%	100.00%	100.00	%	83	%	20.75
						92.0 0	%	96.0 0	%	96.0 0	%	98	%	102.08%	92.00	%	95	%	23.83

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Triwulan II Tahun 2023

No	INDIKATOR	Target Dalam Tahun	Sasaran Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	11.496	4.729	41.14
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	10.974	4.698	42.81
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	10.451	4.535	43.39
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	39.660	15.256	38.47
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	89.00	43.228	48.57

6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Persentase orang usia 15-59 tahun menapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	456.024	107.347	23.54
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	70.551	23.302	33.03
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	172.822	33.784	19.55
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	14.218	5.633	39.62
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	1.417	697	49.19
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	14.202	4.439	31.26
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS=HIV)				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	15.343	7.272	47.40

Sumber : Data Capaian Akhir SPM Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan dari Tabel diatas maka dapat dijelaskan, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Triwulan II Tahun 2023 sebesar 41.14% dari target 100%, dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya terkait Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dilakukan dengan memenuhi kriteria 10 T, diantaranya :

- a) Penimbangan berat badan;
- b) Pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara teratur;
- c) Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
- d) Pengukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri) yang dilakukan secara teratur;
- e) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung jani (DJJ);
- f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (Td);
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h) Tes Laboratorium mencakup: Tes kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan Golongan Darah dan Gluko-Protein urin dilakukan atas indikasi yang diperlukan;
- i) Tatalaksana/penanganan kasus dilakukan sesuai dengan kewenangan pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4 (rujukan penanganan kasus komplikasi dalam kehamilan);
- j) Temu wicara (konseling) dilakukan mengacu pada buku pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Triwulan II Tahun 2023 sebesar 42.81% dari target 100%, dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kota Pontianak. Pelayanan persalinan sesuai standar merupakan pertolongan persalinan baik normal maupun komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta, yang berupa :

- a. Persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

- b. Persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Adapun realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Triwulan II Tahun 2023 sebesar 43.39% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial yang terdiri dari:

- a. Perawatan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) dan;
- b. Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Dilakukan minimal 3 kali sesuai dengan periode Kunjungan Neonatal (KN) yaitu: KN1 (6 - 48 jam), KN2 (3 - 7 hari) dan KN3 (8 - 28 hari).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Realisasi capaian kinerja untuk Pelayanan Kesehatan Balita Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 38.47% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan. Jenis Pelayanan Kesehatan Balita, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan
- b. Pelayanan Kesehatan balita 12-23 bulan
- c. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebesar 48.57% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar adalah skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala) yang diberikan kepada anak usia pendidikan

dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 sebanyak 1 kali setiap tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan status gizi
- b. Pemeriksaan tanda-tanda vital
- c. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun) Triwulan II Tahun 2023 yaitu 23.54% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
- b. Pengukuran tekanan darah.
- c. Pemeriksaan gula darah.
- d. Anamnesa perilaku berisiko.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 33.03% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang sesuai standar adalah skrining kesehatan yang dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun, terdiri dari:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

g. Anamnesa perilaku berisiko

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Realisasi Capaian Triwulan II Tahun 2023 sebesar 19.55% dari target 100%.

Adapun Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi;
- Pelayanan kesehatan hipertensi diberikan kepada penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di FKTP.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Triwulan II Tahun 2023 sebesar 39.62% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Adapun Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 49.19% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi.

Mekanisme Pelayanan meliputi :

- a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat;
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
- c. Pemeriksaan status mental
- d. Wawancara
- e. Edukasi kepatuhan minum obat;
- f. Melakukan rujukan jika diperlukan.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Triwulan II Tahun 2023 sebesar 31.26% dari target 100% yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada pasien terduga TBC diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

- a. Pemeriksaan klinis
- b. Pemeriksaan penunjang
- c. Edukasi

Adapun Mekanisme Pelayanan :

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;
- c. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/ atau bakteriologis

dan/atau radiologis;

- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Capaian Kinerja ini di Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 47.40% dari target 100%. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV meliputi : pemberian komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dll), pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke pelayanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV adalah :

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual);

- f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
- g. Pengguna NAPZA suntik (Penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya;
- h. Warga binaan pemasyarakatan, yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Pontianak Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	√		100%	100%	100%	100%	90,12%	93,81%	97%	100%	100%
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	√		100%	100%	100%	100%	91,90%	92,57%	96%	100%	100%
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		100%	100%	100%	100%	91,69%	92,25%	95%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	69,70%	83,15%	84%	100%	100%
5	Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	47,54%	36,33%	67%	100%	100%
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	36,60%	29,71%	72%	100%	100%

7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	51,82%	56,91%	62%	100%	100%
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	25,38%	20,72%	33%	100%	100%
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	42,35%	37,84%	58%	100%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	67,10%	58,06%	66%	100%	100%
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	46,09%	62,07%	87%	100%	100%
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	87,43%	99,47%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2022

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

1. Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan maupun program kegiatan yang berdampak pada kinerja pelayanan secara menyeluruh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan dengan Perangkat Daerah lain yang berkaitan serta Unit Pelayanan Tehnis yang berada di bawah Dinas Kesehatan serta masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kesehatan dan kader kesehatan, agar capaian kinerja dapat terealisasi dengan maksimal.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fasilitas Kesehatan yang berada di bawah wilayah binaan Kota Pontianak baik yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan yang diberikan di beberapa Fasilitas Kesehatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan maupun kerjasama dalam pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tetap mengedepankan kualitas layanan serta penegakan protokol kesehatan yang disiplin. Oleh sebab itu diperlukannya strategi dalam perencanaan pembiayaan kesehatan agar efektif dan efisien.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Tugas Fungsi di masa Pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada. Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan antara lain :

- a. Kebijakan Refocusing anggaran yang berakibat terjadinya perubahan rencana kegiatan yang sudah dilakukan;
 - b. Kebijakan program dan pembiayaan Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak
 - c. Keterbatasan sediaan BHP medis dan obat-obatan masih menjadi kendala, terlebih pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan RI tidak mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk Penyediaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai.
- a. Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan, yaitu :
- a. Perubahan sistem penganggaran keuangan dari SIMAKDA ke SIPD;
 - b. Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Aplikasi, baik aplikasi dari Pusat maupun Aplikasi yang di Kelola Daerah;
 - c. Terjadinya transisi penggunaan aplikasi dari SIPD lama ke SIPD-RI yang baru berdasarkan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam operasionalnya;
 - d. Masih terjadinya penolakan Vaksinasi Covid-19 oleh sebagian kelompok masyarakat;
 - e. Sistem pengadaan Barang Jasa untuk pagu di bawah kurang dari 200 juta melalui elektronik pengadaan yang memerlukan waktu;
 - f. Perubahan sistem pengadaan Barang Jasa untuk penyediaan makan dan minum yang harus dilaksanakan melalui mekanisme E-Katalog, berpotensi Inefisiensi waktu dan sumber daya;
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Terkait dengan dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, secara umum masih bisa kendalikan dengan baik dan terkait dengan beberapa program yang menjadi sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu yang berhubungan dengan Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting di Kota Pontianak masih berada di bawah angka Nasional. Berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Angka Stunting Tahun 2023 di Kota Pontianak berdasarkan hasil survey Penilaian Status Gizi (PSG) sebesar 7.8% dari target yang ditetapkan sebesar 14%.

4. Tantangan dan peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam meningkatkan Pelayanan antara lain :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan yang harus senantiasa perlu ditingkatkan baik pada Fasilitas Kesehatan Primer (Puskesmas) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit);
2. Peluang yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan yaitu Kerjasama Lintas program, dan lintas sektor antar perangkat daerah serta Stakeholder lain yang diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi dalam peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun Formulasi isu-isu penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2023, dapat kami sampaikan pada Tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Formulasi Isu – isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Kesehatan ibu, anak, dan reproduksi	Masih adanya kematian ibu maternal dan kematian Bayi	1) Belum optimalnya sistem rujukan dari FKTP dan FKRTL 2) Kompetensi sumber daya manusia kesehatan masih kurang dalam mendeteksi faktor resiko serta penanganan kegawatdaruratan ibu maternal	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat
			3) Faktor sosial budaya masyarakat yang masih mencari pertolongan kelahiran dengan tenaga non kesehatan dan pemberian imunisasi pada bayi.	

2	Adanya kenaikan prevalensi masalah gizi balita (underweight/berat badan kurang dan wasting/gizi kurang)	1) Kurang adekuat asupan makanan pendamping ASI pada balita di atas usia 6 bulan	Masih banyak orang tua yang tidak paham cara pemberian makan bayi dan anak yang benar sesuai kebutuhan anak	
		2) Belum optimalnya pemantauan pertumbuhan perkembangan balita	1) Masih rendahnya peran serta orang tua / pengasuh balita membawa balita ke Posyandu dan fasilitas kesehatan untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak 2) Masih ada petugas kesehatan belum terlatih untuk pemantauan tumbuh kembang balita sesuai standar 3) Masih kurang kepatuhan petugas kesehatan dalam pencatatan hasil pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil	
3	Adanya kenaikan jumlah kasus ibu hamil dengan masalah gizi Kurang Energi Kalori (KEK), Anemia)	Asupan makan ibu hamil kurang baik kualitas maupun kuantitasnya	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil akan pentingnya nutrisi saat hamil	
4	Penyakit Menular	Masih ditemukannya Kasus Penyakit Menular (Demam Berdarah, Diare, ISPA, HIV, TBC, PD3I, dan Hepatitis B Pada ibu hamil) dan penyakit berpotensi wabah (penyakit infeksi emerging/re emerging seperti :	1) Sanitasi yang tidak sehat dan PHBS dimasyarakat masih rendah 2) masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan masih ada perilaku beresiko tinggi. 3) Sarana Prasarana pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini dan menegakkan diagnosa	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

		covid-19, MersCov, Flu Burung, Monkey Fox, dll).	4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung Program pencegahan penyakit menular	
5	Penyakit Tidak Menular	Kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan masih rendah	1) Masih rendahnya masyarakat dalam upaya melakukan kegiatan untuk mengurangi faktor resiko penyakit tidak menular 2) Sarana Prasarana pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini dan menegakkan diagnosa	
6	Kurangnya budaya Gerakan masyarakat hidup sehat	Belum optimalnya deteksi dini kesehatan dikelompok masyarakat dan tempat kerja	1) Keterbatasan SDM pemberi layanan kesehatan	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
			2) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan rendah, khususnya untuk melakukan skrining secara mandiri	
			4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang asupan gizi seimbang.	
7	Kurangnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung Program kesehatan.	1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 2) Masih kurangnya dukungan dari lintas sektor terkait program kesehatan di masyarakat	
8	Keterbatasan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya	1) Belum semua Fasilitas Kesehatan memiliki sarana prasarana, alat kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan	Keterbatasan anggaran kesehatan yang dialokasikan belum mencukupi dan memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan Sistem Kesehatan

	<p>manusia, pembiayaan, teknologi informasi kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, dan penunjang layanan lainnya.</p>	<p>penunjang lainnya (obat, vaksin, alat pcr, dll) yang memenuhi standar</p>		
		<p>2) Kurangnya jumlah Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan, serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas, sehingga menyebabkan pemberian layanan kesehatan kurang optimal</p>	<p>Adanya moratorium penerimaan PNS dan tenaga harian lepas oleh pemerintah dan belum dipenuhinya formasi sesuai dengan rencana kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah yang telah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Sedangkan jumlah tenaga yang pensiun dan mutasi terus bertambah</p>	
9	<p>Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya yang terkait dengan pembiayaan kesehatan</p>	<p>Belum semua penduduk Kota Pontianak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) baik mandiri maupun penerima bantuan sehingga sistem pembayaran masih cenderung tidak efektif dan masih dibayarkan mandiri oleh masyarakat secara langsung, sehingga banyak menyebabkan masyarakat kurang mampu tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai</p>	<p>Belum semua masyarakat tidak mampu tercover menjadi peserta penerima bantuan iuran baik APBN maupun APBD disebabkan karena keterbatasan anggaran, masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang jaminan kesehatan nasional (JKN) dan manfaatnya, disisi lain masih ada masyarakat menganggap biaya iuran bulanan terlalu tinggi serta beberapa pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS</p>	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Tabel. 2.5, dapat dilihat perbandingan rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan catatan penting terkait hasil analisis kebutuhan di Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel.2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD (Tahun 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (Tahun 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95%	211.604.483.181	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95%	211.604.483.181	1) Untuk saat ini RS Siantan Hilir belum bisa diusulkan sebagai RS bersumber dana BLUD, sehingga untuk Biaya operasional rutin masih perlu dukungan anggaran bersumber dana APBD; 2) Terkait dengan biaya operasional RS Kota Pontianak Tahun 2021, yang bersumber Dana DAK Fisik tidak dapat diselesaikan 100% sehingga untuk penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan surat pernyataan Keputusan Daerah yang dibuat;
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97%				Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97%		

		Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97%			Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97%		<p>3) Dengan adanya Pandemi Covid-19, menghambat beberapa Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, sehingga terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang difocusing atau dialihkan kepada kegiatan pendukung penurunan Covid-19;</p> <p>4) Anggaran terkait BPJS kurang sehingga tidak mampu untuk dibayarkan bagi peserta PBI di Kota Pontianak</p> <p>5) Untuk Sub. Kegiatan yang mengampu Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu ditambahkan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (mengingat SPM termasuk salah satu Kinerja Pemkot yang harus diutamakan).</p>
		Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95%			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95%		
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%			Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%		

1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100%	32.942.886.409	1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100%	32.942.886.409	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100%			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100%	Tambahan : Rp. 15 M (Pembangunan RS beserta Sarana Prsarana Pendukungnya)	
1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1)Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama /paripurna = 6 puskesmas)	177.755.432.261	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1)Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama /paripurna = 6 puskesmas)	177.755.432.261	

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					
			2)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%				2)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Tambahan : Rp. 16 M (Operasional Pelayanan RS. Siantan Hilir)
			3)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%				3)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	Tambahan : Rp. 2 M (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)
			4)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%				4)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Tambahan : Rp. 1 M (Operasional Pelayanan 25 UPTD/UPK)
			5)Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%				5)Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%	Tambahan : Rp. 250 jt x 12 SPM = 3 M (Pengampu Sub.

			Balita sesuai Standar				Balita sesuai Standar		Kegiatan SPM yang ada)	
			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		
			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	100%			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	100%		

			sesuai standar				sesuai standar			
			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%		

			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%				12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		
			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%				13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		
			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%				14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%		
			15)Persentase jemaah calon haji yang	100%				15)Persentase jemaah calon haji yang	100%		

			terdeteksi faktor resiko kesehatan				terdeteksi faktor resiko kesehatan			
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100%			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100%		
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk		
			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100%			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100%		
			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak	100%			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak	100%		

			mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan				mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan			
			20)Persentase pemeriksaan crosscek slide TBC	100%			20)Persentase pemeriksaan crosscek slide TBC	100%		
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80%	520.237.179	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80%	520.237.179	
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100%	385.927.333	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan	Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100%	385.927.333	

	Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota				
			Penyediaan Biaya Operasional RS	100%				Penyediaan Biaya Operasional RS	100%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	896.773.358	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	896.773.358
			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%				Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	
	1.1)Perencanaan Kebutuhan dan		Persentase praktek tenaga kesehatan yang	100%	381.482.351	1.1)Perencanaan Kebutuhan dan		Persentase praktek tenaga kesehatan yang	100%	381.482.351

	Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota		dilakukan pembinaan dan pengawasan			Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota		dilakukan pembinaan dan pengawasan			
	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100%	515.291.007	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100%	515.291.007	

3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	327.871.203	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	327.871.203	
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85%	-	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85%	-	

	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100%	101.323.981	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100%	101.323.981	
	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk	100%	101.323.981	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk	100%	101.323.981	

	P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		memiliki ijin operasional			Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		memiliki ijin operasional			
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100%				Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100%		

	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Res toran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85%	101.323.981	1.4) Penerbita n Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Re storan dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85%	101.323.981	
	1.5) Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an Post Market pada Produksi dan Produk		Persentase Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaa n post market pada produksi dan produk makanan	100%	-	1.5) Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an Post Market pada Produksi dan		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri	100%	-	

	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		minuman industri Rumah Tangga			Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Rumah Tangga			
4	Program Pemberday aan Masyaraka t Bidang Kesehatan	Kota Pontia nak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksana n	90%	349.690.000	Program Pemberda yaan Masyaraka t Bidang Kesehatan	Kota Ponti anak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	349.690.000	
	1.1) Advokasi, Pemberday aan, Kemitraan, Peningkata n Peran serta Masyaraka t dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100%	349.690.000	1.1) Advokasi, Pemberda yaan, Kemitraan , Peningkat an Peran serta Masyaraka t dan Lintas Sektor Tingkat Daerah		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100%	349.690.000	

						Kabupaten /Kota					
	PROGRAM RUTIN					PROGRAM RUTIN					
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretaria tan	80%	138.185.426.026	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretaria tan	80%	138.185.426.026	
	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	270.390.159	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen		
	1.2) Administrasi		Jangka waktu penyelengg	12 Bulan	123.904.283.003	1.2) Administrasi		Jangka waktu penyelengg	12 Bulan	123.904.283.003	

	Keuangan Perangkat Daerah		araan administrasi keuangan perangkat daerah			Keuangan Perangkat Daerah		araan administrasi keuangan perangkat daerah		
	1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	105.572.500	1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	105.572.500
	1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	6.499.080.370	1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	6.499.080.370
	1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	6 Unit	3.041.833.520	1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	6 Unit	3.041.833.520

	Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah			
	1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.166.641.473	1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.166.641.473	
	1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit	1.085.700.000	1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit	1.085.700.000	
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6 Unit	111.925.000			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6 Unit	111.925.000	

	Jumlah			351.364.243.768	Jumlah			388.364.243.768	
--	--------	--	--	-----------------	--------	--	--	-----------------	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020 – 2024, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 2.6, sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97	
			Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95	

			Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100	
	1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	Usulan ASMAS pada Musrenbang 2023 renovasi Pusk Khatulistiwa, Pembangunan Puskesmas Pembantu di Batu Layang, serta Usulan Ambulance Pusk. Khatulistiwa akan di usulkan melalui DAK 2023
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	
	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1)Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	
			2)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
			3)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	
			4)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	

			5)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	
			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	
			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	
			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	
			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang	100	

			mendapatkan imunisasi dasar lengkap		
			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100	
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	
			18)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100	
			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	
			20)Persentase pemeriksaan croscek slide TBC	100	
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80	
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	
			Penyediaan Biaya Operasional RS	100	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 Per 1.000 Penduduk	

			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	
	1.1)Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	
	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90	
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85	
	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100	
	1.3)Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	

	dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100	
	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85	
	1.5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Pontianak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	
	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	
	PROGRAM RUTIN				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80	
	1.1)Perencanaan, Penganggaran, dan		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan	10	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah		
1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	
1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	
1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	
1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	
1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	
1.7)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak,2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi dan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak menetapkan Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 beserta indikator dan target sebagaimana tercantum pada Tabel berikut berikut dibawah ini :

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Pontianak**

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					172,294,315,082	194,611,945,301			239,219,756,877		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				128,447,681,889	150,163,951,658			143,652,180,751		
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96,144,517	57,119,517			101,721,500	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	0 Dokumen 7 dokumen	43,087,017	29,062,017	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80,0 %	36,571,500
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0			0	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Jumlah pertemuan perencanaan tingkat puskesmas	8 dokumen 1 kali	8 dokumen 1 kali	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280,000,000
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96,144,517	57,119,517			101,721,500	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	53,057,500	28,057,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80,0 %	65,150,000

1	02	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					121,776,838,28 5	143,890,690,11 7				140,405,043,3 50
1	02	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	12 Bulan 0 Orang/bulan	119,818,819,985	141,722,306,817	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80,0 %	130,189,600,00 0
1	02	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					0	0	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		144,507,790,00 0

1	02	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0	0				116,129,750
1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					121,776,838,285	143,890,690,117				140,405,043,350
1	02	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	1,678,915,000	1,889,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		80,0 %	10,000,000,000
1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			358,316,165
1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					121,776,838,285	143,890,690,117				140,405,043,350
1	02	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	12 Bulan	279,103,300	279,103,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		80,0 %	215,443,350
1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,129,750
1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					121,776,838,285	143,890,690,117				140,405,043,350
1	02	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	0			80,0 %	0
1	02	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					129,750,000	179,750,000				129,750,000

1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	12 Laporan	129,750,000	179,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		80 %	129,750,000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			116,129,750
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					74,290,000	74,290,000				0
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	0 Paket	74,290,000	74,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 %	0
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			286,730,675
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					633,624,792	357,224,029				342,510,029
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	20,422,078	21,782,078	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		80 %	20,422,078

1	02	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	269,216,096	106,245,333	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	89,685,333
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0		0
1	02	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		356,463,282
1	02	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0	0			4,245,621,233
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							633,624,792	357,224,029		342,510,029
1	02	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	38,266,943	39,626,943	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	38,266,943
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	0		0
1	02	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,506,150,525
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							633,624,792	357,224,029		342,510,029

1	02	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	76,710,000	76,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	116,730,000
1	02	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	42,993,675	44,353,675	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	42,993,675
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	0			0
1	02	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0	0			53,240,000
1	02	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						633,624,792	357,224,029			342,510,029

1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	4,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0			0
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,235,760
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					633,624,792	357,224,029			342,510,029
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	184,016,000	66,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 %	30,412,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0			0
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		477,210,800
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0			0
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,070,818,200

1	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				585,973,235	615,032,935				466,030,850
1	02	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	0			0
1	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0				0
1	02	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	10 unit	10 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,068,116,852
1	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				585,973,235	615,032,935				466,030,850
1	02	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		68 Unit	68 Unit	585,973,235	615,032,935	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		466,030,850
1	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,497,162,600	3,209,726,600				1,383,000,000
1	02	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	383,000,000	352,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		383,000,000
1	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0				0
1	02	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon dan air serta listrik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,483,305,620
1	02	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,497,162,600	3,209,726,600		1,383,000,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	3,114,162,600	2,857,676,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1,000,000,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,653,898,460	1,780,118,460		824,125,022	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	12 Unit	534,350,000	534,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	489,236,562
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0		0	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	726,000,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,653,898,460	1,780,118,460		824,125,022	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		107 Unit	107 Unit	65,460,000	73,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	94,100,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0		0	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0		123,117,500

1	02	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,653,898,460	1,780,118,460			824,125,022
1	02	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	1 Unit	1 Unit	1,054,088,460	1,171,788,460	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	240,788,460
1	02	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0			0
1	02	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	468,270,000
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				0	0			0
1	02	02	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0
1	02	02	2.0 1	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit yang dibangun	1 unit	1 unit	0	0		0
1	02	02	2.0 1	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23,200,000,000
1	02	02	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19,160,312,363	18,702,934,363			58,430,844,415

1	02	02	2.0 1	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 unit	0 Unit 1 unit	5,516,711,500	5,853,311,500	Dana Insentif Daerah		100%	23,381,811,000
1	02	02	2.0 1	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	4 unit	4 unit	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		100%	11,835,278,861
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0
1	02	02	2.0 1	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,600,000,000
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19,160,312,363	18,702,934,363				58,430,844,415
1	02	02	2.0 1	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun	5 unit	5 unit	0	0			100%	3,000,000,000

1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0	
1	02	02	1.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun		5 unit	5 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,000,000,000
1	02	02	1.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan		2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550,000,000
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19,160,312,363	18,702,934,363		58,430,844,415	
1	02	02	1.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		2 unit 0 Unit	2 unit 0 Unit	0	0	Dana Insentif Daerah	13,440,978,400
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0	
1	02	02	1.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengembangan		2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,500,000
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19,160,312,363	18,702,934,363		58,430,844,415	

1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		1 unit	1 unit	658,092,000	658,092,000	Dana Insentif Daerah		100%	0
1	02	02	2.00		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		2 unit	2 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		3 unit	3 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000,000
1	02	02	2.00		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					19,160,312,363	18,702,934,363				58,430,844,415
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		0 unit	0 unit	0	0			100%	0
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		6 Unit	6 Unit	8,469,349,405	7,671,866,005	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		100%	2,505,373,767

1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0		
1	02	02	2.0	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki minimal 60% alat kesehatan sesuai standar		24 UPT	24 UPT	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,765,600,304
1	02	02	2.0	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah UPT yang memenuhi capaian indikator 40 item obat wajib dan 5 vaksin imunisasi dasar lengkap Jumlah UPT yang mendapatkan distribusi obat setiap bulan		23 UPT Puskesmas 24 UPT	23 UPT Puskesmas 24 UPT	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,560,089,333
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					19,160,312,363	18,702,934,363			58,430,844,415	
1	02	02	2.0	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2,344,479,812	2,344,910,212	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	3,903,656,172
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0	
1	02	02	2.0	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan medis sesuai standar		23 UPT Puskesmas	23 UPT Puskesmas	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,036,300,000
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					19,160,312,363	18,702,934,363			58,430,844,415	

1	02	02	2.0 1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	2,127,896,946	2,131,493,946	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	285,323,490	
1	02	02	2.0 1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		6 Unit	6 Unit	43,782,700	43,260,700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	78,422,725	
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	0				0
1	02	02	2.0 1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah frekuensi alat kesehatan yang dilakukan pemeriksaan Jumlah UPT yang melaksanakan kegiatan kalibrasi alat kesehatan		23 kali 25 UPT	23 kali 25 UPT	0	0					99,000,000
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0				0

1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Audit kematian ibu hamil dan bersaling Jumlah kader kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersaling Jumlah petugas yang terlatih pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin Koordinasi pelayanan kesehatan program kesehatan keluarga Monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan maternal, neonatal dan bayi	5 kali 70 orang 122 orang 6 kali 11 kali 100 persentas	5 kali 70 orang 122 orang 6 kali 11 kali e 100 persentas	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)			306,802,107
1	02	02	2.00		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12527 Orang	12527 Orang	470,719,222	640,550,622	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%		241,872,634
1	02	02	2.00		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0				0	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil dan bersalin dan neonatal yang mendapatkan jaminan persalinan	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)			1,498,800,000

1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653	
1	02	02	2.0 2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11958 Orang	11958 Orang	162,500,000	24,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	162,500,000
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0	
1	02	02	2.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	audit kematian bayi Jumlah petugas yang terlatih pelayanan kesehatan bayi baru lahir		5 kali 48 orang	5 kali 48 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		306,802,107
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)				
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11388 Orang	11388 Orang	215,640,000	472,715,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	306,802,107
1	02	02	2.0 2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		57107 Orang	57107 Orang	197,800,000	197,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	94,966,000
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0	

1	02	02	2.0 2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kader kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah Jumlah petugas yang terlatih pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah		70 orang 125 orang 100 persen	70 orang 125 orang 100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			312,382,000
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661					35,029,316,653
1	02	02	2.0 2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		96730 Orang	96730 Orang	45,471,520	45,471,520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100%	28,950,000
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0	

1	02	02	2.0 2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Kader kesehatan yang terlatih Pelayanan kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar Jumlah petugas yang terlatih pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah pendidikan dasar Persentase ketersediaan bahan pendukung pelayanan kesehatan usia sekolah dasar		80 orang 70 orang 100 persen	80 orang 70 orang 100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			229,846,967
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653
1	02	02	2.0 2	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		438251 Orang	438251 Orang	874,288,044	870,068,044	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100%	49,550,000
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0

1	02	02	2.0 2	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pelayanan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada calon pengantin Monitoring evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Keluarga Berencana Persentase ketersediaan bahan pendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 100 persen	2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 100 persen	0	0			454,144,099	
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653
1	02	02	2.0 2	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66193 Orang	66193 Orang	75,271,520	75,271,520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	53,048,790	
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0	

1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah kader kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah petugas yang terlatih pelayanan kesehatan pada usia lanjut Koordinasi pelayanan kesehatan pada usia lanjut monitoring dan evaluasi pada usia lanjut persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut	95 orang 48 orang 4 kali 4 kali 100 persen	95 orang 48 orang 4 kali 4 kali 100 persen	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)			243,822,467
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Jumlah puskesmas yang mendapatkan monev pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	46 orang 23 UPT Puskesmas	46 orang 23 UPT Puskesmas	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)			331,826,343
1	02	02	2.02	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165559 Orang	165559 Orang	63,649,200	63,289,200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	21,789,200

1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0	
1	02	02	2.0	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan Persentase ketersediaan bahan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kali 100 persen	5 kali 100 persen	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		331,826,343
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653	
1	02	02	2.0	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13620 Orang	13620 Orang	13,976,200	63,289,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	gkan gkan a g a 85 % n 95 % g90 % k100 % a100 % 85 % an ng n	1,767,121,200
1	02	02	2.0	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		1407 Orang	1407 Orang 0 Orang	10,972,594	10,612,594	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	gkan gkan a g a 85 % n 95 %	11,512,594
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0	

1	02	02	2.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah monitoring, evaluasi, dan koordinasi petugas kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah petugas puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa Jumlah Sosialisasi Gerakan Deteksi Dini FR PTM terkait masalah Jiwa-Napza (BOK/DAK)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kali 23 orang 0 kali	5 kali 23 orang 0 kali	0	0			281,826,343
1	02	02	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kader yang melaksanakan Pendampingan Minum Obat Jumlah Kegiatan Kampanye TB Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar Jumlah penderita TBC yang dilakukan contac tracing Jumlah penderita TBC yang ditemukan Jumlah petugas kesehatan yang terlatih pengelolaan Program TB		60 orang 1500 orang 1 kegiatan 8100 orang 1500 orang 1500 orang 34 orang	60 orang 1500 orang 1 kegiatan 8100 orang 1500 orang 1500 orang 34 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		304,323,013
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653

1	02	02	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		60 orang 0 Orang	60 orang 0 Orang	595,072,500	621,602,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	304,323,013
1	02	02	2.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		15467 Orang	15467 Orang	321,519,800	318,419,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		g kan g kan a g a 85 % n 95 % g 90 % k 1 a 0 n 0 % a 100 % 85 % an g ng n	300,000,000
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0
1	02	02	2.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)			682,542,079
1	02	02	2.0 2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0	0				1,285,363,198
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653

1	02	02	2.0 2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	12 Dokumen	688,969,750	623,003,650	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	1,175,330,892
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0
1	02	02	2.0 2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,025,000,000
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653
1	02	02	2.0 2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	861,864,800	861,864,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100%	175,080,672

1	02	02	2.0 2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	170,791,884	170,791,884	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	170,651,884
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0
1	02	02	2.0 2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		509,927,063
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661				35,029,316,653
1	02	02	2.0 2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	32,733,600	32,013,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil	g kan g kan a g a 85 %	262,864,000
1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0
1	02	02	2.0 2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		156,257,525
1	02	02	2.0 2	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,625,476

1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653	
1	02	02	2.0	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	12 Dokumen	32,023,512	31,663,512	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	32,563,512
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0	
1	02	02	2.0	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,500,000
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653	
1	02	02	2.0	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,289,948,090	2,392,948,090	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	1,693,648,090
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0			0	
1	02	02	2.0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0	0			4,803,309,250
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661			35,029,316,653	

1	02	02	2.0 2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	12 Dokumen	1,296,700,100	1,192,599,725	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	874,779,900
1	02	02	2.0 2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pembayaran Premi PBI Kota Pontianak		35219 orang	0 Dokumen 35219 orang	14,630,613,200	14,630,613,200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		100%	16,302,500,000
1	02	02	2.0 0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0
1	02	02	2.0 2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000,000
1	02	02	2.0 2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			31,000,000,000

1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661		35,029,316,653		
1	02	02	2.0	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	10,303,192,865
1	02	02	2.0	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		94 Unit	94 Unit	295,123,300	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	295,123,300
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0		
1	02	02	2.0	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,571,859,805
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22,345,648,836	23,367,865,661		35,029,316,653		

1	02	02	2.0 2	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		100%	372,379,000
1	02	02	2.0 2	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14202 Orang	0	8,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8,540,200
1	02	02	2.0 2	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97 Orang	0	14,701,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	14,701,600
1	02	02	2.0 2	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6588 Orang	0	5,525,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5,525,200

1	02	02	2.0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				0	0		0			
1	02	02	3	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		301,395,633
1	02	02	2.0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				270,940,000	270,940,000			513,664,633		
1	02	02	3	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	62,731,000	62,731,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	301,395,633
1	02	02	3	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	208,209,000	208,209,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	100%	212,269,000
1	02	02	2.0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				0	0			0		
1	02	02	3	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		572,260,896
1	02	02	2.0	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				624,775,626	624,775,626			197,888,549		

1	02	02	2.0 4	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		12 RS	12 RS	40,503,900	40,503,900	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	40,503,900
1	02	02	2.0 0		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0				0
1	02	02	2.0 4	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			358,520,066
1	02	02	2.0 4	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			125,716,671
1	02	02	2.0 0		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					624,775,626	624,775,626				197,888,549
1	02	02	2.0 4	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		94 Unit	94 Unit	584,271,726	584,271,726	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		100%	157,384,649

1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				106,135,000	142,135,000		268,878,000	
1	02	03	2.0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				31,400,000	67,400,000		235,008,000	
1	02	03	2.0 2	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	31,400,000	67,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	235,008,000
1	02	03	2.0	0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				0	0		0
1	02	03	2.0 2	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	419,630,586
1	02	03	2.0	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				74,735,000	74,735,000		33,870,000
1	02	03	2.0 3	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang	80 Orang	74,735,000	74,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	33,870,000
1	02	03	2.0	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0
1	02	03	2.0 3	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0		566,820,108

1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				0	0		0		
1	02	04	2.0	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0	0		0		
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26,289,186		
1	02	04	2.0	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				96,040,850	95,556,850		422,262,710		
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225 Sarana	225 Sarana	96,040,850	95,556,850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90 %	422,262,710
1	02	04	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0	0		0		
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111,456,379		

1	02	04	2.0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				150,374,160	149,319,785				156,854,160
1	02	04	2.0 4	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	150,374,160	149,319,785	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		156,854,160
1	02	04	2.0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0	0				0
1	02	04	2.0 4	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111,456,379
1	02	04	2.0	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				0	0				0
1	02	04	2.0 6	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,889,800
1	02	04	2.0	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				112,431,000	112,431,000				100,889,800

1	02	04	2.0 6	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0 Unit	112,431,000	112,431,000	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	90 %	100,889,800
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	0				0
1	02	05	2.0 0		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0				0
1	02	05	2.0 1	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		384,659,000
1	02	05	2.0 0		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				766,458,758	768,378,758				235,200,000
1	02	05	2.0 1	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12 dokumen	12 dokumen	766,458,758	768,378,758	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		235,200,000
TOTAL										172,294,315,082	194,611,945,301			239,219,756,877

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,847,146,024	2,847,146,024		3,287,607,726	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0		0	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3,218,284,195
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,847,146,024	2,847,146,024		3,287,607,726	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	2,847,146,024	2,847,146,024	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3,287,607,726
TOTAL									2,847,146,024	2,847,146,024		3,287,607,726		

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,543,327,722	1,543,327,722		1,959,706,594	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					1,543,327,722	1,543,327,722		1,959,706,594	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,543,327,722	1,543,327,722		1,959,706,594	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,543,327,722	1,543,327,722	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,959,706,594
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1,889,246,141
TOTAL										1,543,327,722	1,543,327,722		1,959,706,594	

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,521,316,185	1,517,040,865			1,516,986,799
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,500,977,635
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,521,316,185	1,517,040,865			1,516,986,799
			0											
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,521,316,185	1,517,040,865	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 %	1,516,986,799
			2											
TOTAL										1,521,316,185	1,517,040,865			1,516,986,799

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,197,777,827	1,197,777,827	1,449,434,342	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					1,197,777,827	1,197,777,827	1,449,434,342	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,197,777,827	1,197,777,827	1,449,434,342	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,197,777,827	1,197,777,827	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	1,449,434,342
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0		1,353,105,272
TOTAL										1,197,777,827	1,197,777,827		1,449,434,342

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,158,205,657	3,158,205,657		2,557,402,946	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN								3,158,205,657	3,158,205,657		2,557,402,946	
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,158,205,657	3,158,205,657		2,557,402,946	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	3,158,205,657	3,158,205,657	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2,557,402,946		
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		0
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			2,611,697,772		
TOTAL										3,158,205,657	3,158,205,657		2,557,402,946			

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,863,953,851	1,863,953,851		1,507,769,838
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0		0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0
			0										
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0		1,373,524,845
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,863,953,851	1,863,953,851		1,507,769,838
			0										
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,863,953,851	1,863,953,851	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	1,507,769,838
			2										
TOTAL										1,863,953,851	1,863,953,851		1,507,769,838

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,709,448,581	1,709,448,581			1,686,908,017
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,515,335,127
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,709,448,581	1,709,448,581			1,686,908,017
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,709,448,581	1,709,448,581	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,686,908,017
TOTAL										1,709,448,581	1,709,448,581			1,686,908,017

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,682,112,759	1,682,112,760		0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN							0	0		0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0		0
1	02	02	2.	0	Operasional Pelayanan Puskesmas						0	0			1,334,181,864
1	02	02	2.	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,682,112,759	1,682,112,760		0
1	02	02	2.	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,682,112,759	1,682,112,760	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0
TOTAL										1,682,112,759	1,682,112,760			0	

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,370,934,433	1,370,934,433			1,369,417,256
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,306,683,125
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,370,934,433	1,370,934,433			1,369,417,256
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,370,934,433	1,370,934,433	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,369,417,256
TOTAL										1,370,934,433	1,370,934,433			1,369,417,256

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,599,977,905	1,599,977,905		1,736,605,183	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN								0	0		0	
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		0	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0	0			1,602,422,137	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,599,977,905	1,599,977,905		1,736,605,183
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,599,977,905	1,599,977,905		Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,736,605,183	
TOTAL											1,599,977,905	1,599,977,905		1,736,605,183		

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,643,373,277	2,643,373,277		2,465,925,859
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN							0	0		0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0		0
1	02	02	2.	0	Operasional Pelayanan Puskesmas						0	0			2,570,162,606
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,643,373,277	2,643,373,277		2,465,925,859
1	02	02	2.	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	2,643,373,277	2,643,373,277	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2,465,925,859
TOTAL											2,643,373,277	2,643,373,277		2,465,925,859	

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					858,384,702	858,384,702			902,614,373
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
1	02	02	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			849,976,749
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					858,384,702	858,384,702			902,614,373
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	858,384,702	858,384,702	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		902,614,373
TOTAL										858,384,702	858,384,702			902,614,373

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					987,897,329	987,897,329			1,108,868,458
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,062,573,570
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					987,897,329	987,897,329			1,108,868,458
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	987,897,329	987,897,329	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,108,868,458
			0											
TOTAL										987,897,329	987,897,329			1,108,868,458

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN								1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578	
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,056,541,059	1,056,541,059	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		887,575,578		
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		0
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			803,517,878		
TOTAL										1,056,541,059	1,056,541,059		887,575,578			

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,141,797,796	2,141,797,796		2,305,344,410
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0		0
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0
1	02	02	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0		1,975,401,434
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,141,797,796	2,141,797,796		2,305,344,410
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	2,141,797,796	2,141,797,796	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2,305,344,410
TOTAL										2,141,797,796	2,141,797,796		2,305,344,410

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,225,558,550	2,225,558,550		2,458,607,044	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN								2,225,558,550	2,225,558,550		2,458,607,044	
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,225,558,550	2,225,558,550		2,458,607,044	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	2,225,558,550	2,225,558,550	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2,458,607,044		
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		0
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			2,200,506,162		
TOTAL										2,225,558,550	2,225,558,550		2,458,607,044			

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,772,454,744	1,722,454,744		1,886,447,902	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN								1,772,454,744	1,722,454,744		1,886,447,902	
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,772,454,744	1,722,454,744		1,886,447,902	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,772,454,744	1,722,454,744	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,886,447,902		
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		0
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,702,629,786		
TOTAL										1,772,454,744	1,722,454,744		1,886,447,902			

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,201,808,218	1,201,808,218			1,313,636,345
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,419,769,618
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,201,808,218	1,201,808,218			1,313,636,345
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,201,808,218	1,201,808,218	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	1,313,636,345
TOTAL										1,201,808,218	1,201,808,218			1,313,636,345

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,770,994,601	1,770,994,601			1,909,931,487
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					0	0			0
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,716,782,321
1	02	02	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,770,994,601	1,770,994,601			1,909,931,487
			0											
1	02	02	2.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,770,994,601	1,770,994,601	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1,909,931,487
TOTAL										1,770,994,601	1,770,994,601			1,909,931,487

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,900,809,176	2,900,809,176		2,782,570,486
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN							0	0		0
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0		0
1	02	02	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0	0			2,660,082,075
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,900,809,176	2,900,809,176		2,782,570,486
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	2,900,809,176	2,900,809,176	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	2,782,570,486	
TOTAL										2,900,809,176	2,900,809,176		2,782,570,486		

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,671,988,186	1,671,988,186		1,890,558,104	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					1,671,988,186	1,671,988,186		1,890,558,104	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,671,988,186	1,671,988,186		1,890,558,104	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	1,671,988,186	1,671,988,186	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100%	1,890,558,104
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0		0	
1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas					0	0			1,590,414,703
TOTAL										1,671,988,186	1,671,988,186		1,890,558,104	

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							976,602,392	836,258,463		942,440,692
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN							976,602,392	836,258,463		942,440,692
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							976,602,392	836,258,463		942,440,692
1	02	02	2.0	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen	12 Dokumen	976,602,392	836,258,463	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		942,440,692	
1	02	02	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0		0
1	02	02	2.0	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	0			839,121,826	
TOTAL										976,602,392	836,258,463		942,440,692		

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								89,525,525,174	109,964,585,850		85,575,166,379
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								73,301,608,334	93,740,669,010		12,606,415,137
1	02	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0		0
1	02	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0		0		
1	02	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0		0
1	02	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		7 dokumen	7 dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18,746,426		
1	02	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58,566,894		
1	02	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0		0
1	02	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0		0		
1	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0	0		5,819,325,000
1	02	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	563,685,000		

1	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0			0
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1,120,900,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							6,809,154,000
1	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0			5,819,325,000
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				5,255,640,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							0
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0			0
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							87,855,795
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0			511,235,417
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				0
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0			0
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							220,000,000

1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			697,746,615
1	02	01	2.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0				511,235,417
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	0				0
1	02	01	2.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,408,000,000
1	02	01	2.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0				511,235,417
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	0				0
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	0				511,235,417
1	02	01	2.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0				0
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			511,235,417
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			402,605,000

1	02	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	0			511,235,417
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	0		0
1	02	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0			0
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	630,000,000
1	02	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0			0
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	0		
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	0			0
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,146,100,000
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5,431,083,160	5,065,782,676			6,275,854,720
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan telepon		12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1,721,633,481
1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	0			0
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,404,112,404

1	02	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5,431,083,160	5,065,782,676		6,275,854,720		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan 0 Laporan	5,431,083,160	5,065,782,676	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4,554,221,239
1	02	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	0		0		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,168,767,600
1	02	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	0		0		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	0			0
1	02	01	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD					67,870,525,174	88,674,886,334		0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	67,870,525,174	88,674,886,334	Pendapatan dari BLUD		0
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					16,223,916,840	16,223,916,840		72,608,751,242		
1	02	02	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					16,223,916,840	16,223,916,840		3,693,910,000		

1	02	02	2.0 1	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibe liung	1 Unit	1 Unit	9,211,796,840	9,211,796,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				0	
1	02	02	2.0 1	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		0 Unit	0 Unit	0	0						0
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	0					0
1	02	02	2.0 1	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				2,827,393,800	
1	02	02	2.0 1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH				3,693,910,000	
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						16,223,916,840	16,223,916,840				3,693,910,000	
1	02	02	2.0 1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	0					3,693,910,000	
1	02	02	2.0 1	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	0					0	
1	02	02	2.0 0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	0				0	

1	02	02	2.0 1 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,021,637,640
1	02	02	2.0 1 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,950,000,000
1	02	02	2.0 0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				16,223,916,840	16,223,916,840					3,693,910,000
1	02	02	2.0 1 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	52 Unit	7,012,120,000	7,012,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0
1	02	02	2.0 1 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	0				0
1	02	02	2.0 0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0					0
1	02	02	2.0 1 16	Pengadaan Obat, Vaksin					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			5,500,000,000
1	02	02	2.0 0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				16,223,916,840	16,223,916,840					3,693,910,000
1	02	02	2.0 1 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	0				0
1	02	02	2.0 0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0					0
1	02	02	2.0 1 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			3,300,000,000
1	02	02	2.0 0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0					0
1	02	02	2.0 2 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			853,740,399

1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			68,908,316,242
1	02	02	2.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga harian lepas pengolah makanan		8 orang	8 orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1,037,791,068
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
1	02	02	2.0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		153,604,000
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			68,908,316,242
1	02	02	2.0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0			0
1	02	02	2.0	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie		100 %	100 %	0	0	Pendapatan dari BLUD		67,870,525,174
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
1	02	02	2.0	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					0	0	Pendapatan dari BLUD		64,154,866,858
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			68,908,316,242
1	02	02	2.0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		0 Unit	0 Unit	0	0			0
1	02	02	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0			0
1	02	02	2.0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,193,043

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								10,757,373,654	10,757,378,032		7,383,197,229	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,186,827,899	6,515,999,917		5,370,336,375	
1	02	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,081,500,000	1,027,105,350		2,188,500,000	
1	02	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	12 Dokumen	12 Dokumen	1,081,500,000	1,027,105,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2,188,500,000		
1	02	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah								920,946,954	1,045,333,813		910,000,000
1	02	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	12 Paket	12 Paket	27,100,000	84,743,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000		
1	02	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	654,121,954	862,430,813	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000		
1	02	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0		
1	02	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	0 Paket 12 Paket	239,725,000	98,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,000,000		
1	02	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000		
1	02	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000		

1	02	01	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,337,897,180	2,893,809,494			500,000,000		
1	02	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		12 Unit	12 Unit	505,600,000	311,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000
1	02	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	12 Unit	2,832,297,180	2,582,059,494	Pendapatan Bagi Hasil		0
1	02	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,639,713,765	1,382,607,750			1,604,692,865		
1	02	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	604,692,865	420,522,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		604,692,865
1	02	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1,035,020,900	962,085,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000
1	02	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206,770,000	167,143,510			167,143,510		
1	02	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	206,770,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000
1	02	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit 70 Unit	0	67,143,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		67,143,510

1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN				3,570,545,755	4,241,378,115		2,012,860,854	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,570,545,755	4,241,378,115		2,012,860,854	
1	02	02	2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		1 Unit	1 Unit	701,763,901	1,034,222,805	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	512,860,854
1	02	02	2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		12 Unit	12 Unit	0	0	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	1,500,000,000
1	02	02	2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		6 Unit	6 Unit	1,336,343,501	1,644,283,501	Pendapatan Bagi Hasil	0
1	02	02	2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	800,000,000	817,820,000	Pendapatan Bagi Hasil	0
1	02	02	2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	732,438,353	745,051,809	PENDAPATAN NASLI DAERAH	0
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0	
1	02	02	2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0
1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0	0		0	
1	02	02	2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0
1	02	02	2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
TOTAL							10,757,373,654	10,757,378,032		7,383,197,229		

Berdasarkan Surat Edaran Wali kota Pontianak Nomor 000.7.2.4/24/Bappeda/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka ditetapkan pagu tentative pada rancangan awal Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 323,291,156,000. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Wali Kota per Mei 2023 di tetapkan Kebijakan Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak dengan Pagu Definitif untuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah sebesar **Rp. 360.052.016.516,-**.

3.2 Pendanaan

Pendanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari rancangan awal hingga rancangan akhir anggaran. Adapun perubahan pagu dari rancangan awal ke rancangan akhir sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas Kesehatan terdapat pada penambahan pagu untuk penyediaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penambahan pada Gaji pokok maupun pada Tunjangan Penghasilan Pegawai sebesar Rp. 3,940,400,000,-, dimana pada Tahun anggaran 2023 ditetapkan alokasi tenaga PPPK sebanyak 60 (enam puluh) orang. Kemudian penambahan pagu pada rancangan akhir anggaran Dinas Kesehatan juga terdapat pada penambahan anggaran Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir sebesar Rp. 5,000,000,000,- dan Tambahan anggaran untuk Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara (RSUD Pontianak Utara) dengan nilai pagu sebesar Rp. 4,303,192,865,-. Sehingga total penambahan anggaran antara rancangan awal kebijakan anggaran dengan rancangan akhir adalah sebesar Rp. 13,243,592,865.

BAB IV

PENUTUP

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh ASN yang ada di Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan.
2. Dalam rangka mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*”, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai efektif dan efisien, dan serta berpatokan untuk dapat menguntungkan seluruh masyarakat pro rakyat di Kota Pontianak.
3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan selalu melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya pada capaian kinerja dan anggaran pada akhir tahun.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak,

dr. Saptiko, M.Med.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199603 1 003



DINAS KESEHATAN

JL. JEND. AHMAD YANI TELP. (0561) 760528 FAX. 732602 PONTIANAK 78112
WEB : WWW.DINKESKOTAPONTIANAK.COM, E-MAIL : DINKESPTK@GMAIL.COM